

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta

Gatut Murniatmo *et all*, 1989, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 49.

Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Ed.rev., cet. 12., Djambatan, Jakarta

Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Margono, Suyud, 2004, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

P.J., Suwarno, 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta*, Kanisius, Yogyakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 40

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta

Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta

Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta

Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm.32

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1950 jo. Undang-undang RI Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1950 jo. Undang-undang RI Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan DIY

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Diy Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011-2030

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan  
dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang  
tanah kasultanan dan tanah kadipaten

Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten  
Gunungkidul

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan  
Pulau-Pulau Kecil

### **Makalah atau Laporan Penelitian**

D.G., Bengen, “*Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasih DAS*”,  
Seminar LIPI, Jakarta, 25-26 September 2002.

Antoro, Kus Sri, , 2015, “*Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bidang Pertanahan*”, Jurnal Bhumi, Vol. 1, No. 1

Setyawati, Nur Aini, 2001, “*Sengketa Tanah Kasultanan Setelah Reorganisasi Agraria*”, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Hutagalung, Arie S., 2000, "*Penerapan Lemabag Rechtsverwerking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah*",  
Hukum dan Pembangunan